

# PENDIDIKAN ANAK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DALAM KERANGKA HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Suhartati<sup>1</sup>

## A. Pendahuluan

*Child is a gift from God to create a better world.*

Ungkapan ini menunjukkan bahwa anak adalah karunia dari Tuhan yang nantinya akan menjadi generasi muda penerus cita-cita perjuangan dan pembangunan bangsa untuk menciptakan bangsa dan negara yang maju. Setiap anak memiliki kepribadian dan karakteristik khusus yang melekat dalam dirinya. Setiap anak bagaikan kertas putih yang dapat ditulis dan diberi warna oleh penulisnya. Demikian pula halnya anak yang tumbuh dan berkembangnya akan bergantung pada lingkungan yang membentuknya. Oleh karenanya, pada masa perkembangan anak perlu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Salah satu upaya untuk mencapai optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan anak, perlu diatur tentang pendidikan anak.

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Pendidikan bertujuan untuk membantu anak dalam meningkatkan kemampuan intelektualitas maupun pembentukan karakter yang baik. Pendidikan akan sangat penting fungsinya untuk membentuk manusia secara utuh (holistik) dengan mengembangkan aspek fisik, emosi, sosial, kreativitas, spiritual dan intelektual anak secara optimal. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan sebuah bentuk hak asasi manusia yang dimiliki oleh anak. Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diartikan hak dasar (asas) yang dimiliki dan melekat pada manusia karena kedudukannya sebagai manusia. Tanpa adanya hak tersebut, maka manusia akan kehilangan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau penguasa.

Pendidikan yang bertitik tolak dari pemahaman bahwa pendidikan merupakan hak dari anak akan menjadikan anak bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek. Akan tetapi dalam kenyataannya, sampai saat ini fenomena yang ada dalam masyarakat menunjukkan bahwa anak masih cenderung menjadi obyek.

Di dalam berbagai kampanye politik, salah satu isu yang diangkat adalah tentang isu pendidikan. Hal ini semakin memperjelas bahwa masih terdapat masalah dalam dunia

pendidikan. Pendidikan seringkali menjadi sebuah bisnis yang semata-mata *profit oriented* sehingga seringkali mengaburkan tujuan pendidikan yang hakiki. Masih belum mencukupi rasio antara kuantitas sarana prasarana pendidikan dengan jumlah anak yang membutuhkan, lebih-lebih bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus (*children with special needs*) yang sulit untuk memperoleh sarana prasarana pendidikan yang memadai.

Mengingat hak asasi anak adalah hak asasi manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir, tumbuh dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh. HAM meliputi semua yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya dan hukum positif mendukung pranata sosial yang dibutuhkan untuk pembangunan seutuhnya tersebut. Hukum positif adalah pranata sosial yang dibutuhkan oleh semua manusia untuk melaksanakan hak-hak asasi manusia. Pembangunan adalah dasar dari hak asasi manusia, hak asasi manusia adalah dasar dari hukum positif.<sup>2</sup>

Oleh karenanya beberapa aturan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembangunan manusia seutuhnya termasuk di dalamnya tentang pendidikan terhadap anak. Hukum positif dilahirkan sebagai pranata sosial yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembangunan atau dalam istilah yang lebih manusiawi untuk mengamalkan hak-hak asasi.<sup>3</sup>

Pengembangan pendidikan anak yang berbasis HAM adalah menjadi tugas yang amat penting bagi pemerintah dan negara untuk dapat mewujudkannya dalam berbagai instrumen

---

<sup>2</sup> Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Restu Agung, 2007), h. 11.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 14



hukum positif. Oleh karenanya tulisan ini mencoba melihat implementasi pendidikan anak berbasis HAM dalam kerangka hukum positif di Indonesia.

## B. Pembahasan

Perlindungan hak-hak anak sangat ditentukan oleh adanya kebijakan perlindungan anak (*Child Protection Policy*) dan kebijakan kesejahteraan anak (*Child Welfare Policy*) yang kondusif terhadap usaha-usaha perlindungan hak-hak anak itu sendiri. Berbagai instrumen internasional mengenai perlindungan anak pada umumnya dan anak bermasalah pada khususnya tetap saja menjadi fokus perhatian.<sup>4</sup>

Berbagai instrumen internasional telah mengangkat isu pendidikan anak sebagai salah satu bentuk perlindungan anak dalam HAM yang wajib untuk dilaksanakan. Kerangka HAM nampak dalam *Universal Declaration of Human Rights*. Ketentuan pasal 26 ayat (1) deklarasi tersebut telah mengatur tentang hak setiap orang untuk memperoleh pendidikan:

Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

Pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian manusia dan saling menghargai hak asasi manusia serta hak-hak dasar juga nampak dalam pasal 26 ayat (2) *Universal Declaration of Human Rights*:

---

<sup>4</sup> Made Sadhi Astuti, 2003, "Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak", Universitas Negeri Malang, Malang, h. 12

Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.

Di dalam Konvensi Hak Anak-KHA (*Convention on the Rights of the Child*) pasal 28 dan 29 juga menjabarkan secara jelas hak anak untuk memperoleh pendidikan. Sebagaimana dalam pasal 28 KHA tersebut menentukan: "States Parties recognize the right of the child to education, and with a view to achieving this right progressively and on the basis of equal opportunity..."

Hak pendidikan bagi setiap manusia juga terdapat dalam Konvensi UNESCO tentang Menentang Diskriminasi Pendidikan (1960), Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (1965), dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966). Selain itu juga terwujud penandatanganan Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (*Education for All Declaration*) pada konferensi UNESCO, di Thailand 1990. Deklarasi ini menjadi komitmen bersama negara-negara yang hadir untuk merealisasikan pendidikan dasar yang tersedia, bermutu dan non diskriminatif di masing-masing negara. Realisasi deklarasi tersebut juga sekaligus merupakan upaya untuk memenuhi hak pendidikan sesuai Universal Declaration of Human Rights. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan Forum Pendidikan Dunia di Dakar tahun 2000 yang menghasilkan Millenium Development Goals (MDGs).

Komite hak anak (*Committee on the rights of the child*), yang mengadopsi *General Guidelines Regarding The Form and Contents of Periodic Report to be submitted by the state*

*parties under article 44 Paragraph 1 (B), of the convention,* juga menegaskan hak atas pendidikan.

Berbagai instrumen internasional di atas telah menunjukkan pendidikan merupakan suatu hak bagi setiap orang termasuk anak-anak. Pendidikan merupakan perwujudan hak asasi yang dimiliki oleh anak. Hal ini berarti pendidikan terhadap anak harus berbasis pada hak asasi manusia. Apa pun rumusannya, pelbagai negara di dunia sepakat bahwa HAM adalah hak yang melekat (*inherent*) secara alamiah pada diri manusia sejak manusia lahir dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Tanpa HAM, manusia tak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, meliputi hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial, ekonomi, budaya serta hak untuk berkembang.<sup>5</sup> Terkait dengan kewajiban mengimplementasikan KHA, Komite hak anak (*Committee on the Rights of the child*) menetapkan berbagai pasal sebagai acuan untuk mengimplementasikan KHA, salah satunya yaitu: Pasal 4 mengatur kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administrasi, dan langkah-langkah lain untuk mengimplementasikan hak-hak anak yang diakui dalam KHA termasuk maksimalisasi langkah-langkah dalam mengalokasikan sumber daya yang tersedia guna memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Pelaksanaan pendidikan anak yang berbasis HAM melalui instrumen hukum internasional akan dapat diimplementasikan dalam kehidupan suatu negara bilamana diatur dalam berbagai instrumen nasional negara tersebut. Oleh karenanya beberapa instrumen hukum nasional yang mengatur tentang pendidikan

---

<sup>5</sup> Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: The Habibie Center, 2002), h. 56-57.



di Indonesia tampak dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disingkat dengan Undang-undang Kesejahteraan Anak), Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat Undang-undang HAM), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat Undang-undang Perlindungan Anak), serta Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disingkat Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional).

Di dalam UUD 1945, hak tersebut dilindungi oleh pasal 31 yaitu hak untuk mendapat pendidikan sekaligus menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional telah mengamanatkan dilaksanakannya pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia sejak usia dini, yakni sejak anak dilahirkan. Undang-Undang mengenai pendidikan tersebut merupakan perwujudan dari pemenuhan hak pendidikan warga negara. Indonesia pada tahun 1990, telah menandatangani sebuah Deklarasi Dunia tentang Pendidikan Untuk Semua (*Education for All Declaration*) pada konferensi UNESCO, di Thailand.

Di dalam Undang-Undang HAM juga dengan jelas menentukan tentang hak bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan sesuai pasal 12: "Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia." Secara khusus, bagi anak-anak juga dijamin hak-haknya dalam memperoleh pendidikan dalam ketentuan pasal 60 Undang-undang HAM:

- (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan kecerdasannya.
- (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Senada dengan ketentuan dalam Undang-undang HAM, pada pasal 9 Undang-undang Perlindungan Anak telah menentukan:

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pemerintah juga telah memberlakukan Undang-Undang Kesejahteraan Anak dimana dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna. Dengan penjelasan, yang dimaksud pelayanan antara lain kesempatan memperoleh pendidikan dan kesehatan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Abdussalam, op.cit., h. 25.



Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu tidaklah cukup hanya diberikan hak-hak dan kebebasan asasi yang sama dengan orang dewasa, karena anak di banyak bagian dunia sebagai akibat dari keadaan sosial yang tidak memadai, bencana alam, sengketa senjata, eksploitasi, buta huruf, kelaparan dan ketelantaran. Anak kondisi tersebut tidak mampu melawan atau mengubah keadaan tersebut secara efektif untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu masyarakat internasional mendesak kepada semua negara pemerintahan untuk mensahkan dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang mengakui kedudukan dan kebutuhan khusus anak dan yang menciptakan kerangka perlindungan tambahan yang kondusif dengan kesejahteraan mereka.<sup>7</sup>

Oleh karenanya jelas bahwa pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi pemerintah untuk melaksanakannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 69 ayat (2) Undang-undang HAM: "Setiap hak asasi manusia yang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan dan memajukkannya." Di dalam pasal 71 Undang-undang HAM juga ditentukan: "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indo-

<sup>7</sup> Ibid., h. 11-12.

nesia." Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara, dan bidang lain.

Kewajiban hukum dari pemerintah terhadap pendidikan anak yang berbasis hak asasi manusia mengacu pada 4A yaitu *Availability* (ketersediaan), *Accessibility* (keterjangkauan), *Acceptability* (keberterimaan), dan *Adaptability* (kebersesuaian).<sup>8</sup>

*Availability* (ketersediaan), mengacu pada tiga macam kewajiban pemerintah yaitu: (1) pendidikan sebagai hak sipil dan politik mensyaratkan pemerintah untuk mengizinkan pendirian sekolah-sekolah yang menghargai kebebasan terhadap pendidikan dan dalam pendidikan, (2) pendidikan sebagai hak sosial dan ekonomi masyarakat pemerintah untuk menjamin pendidikan wajib dan tanpa biaya bagi anak usia sekolah, dan (3) pendidikan sebagai hak budaya mensyaratkan dihargainya keragaman, khususnya hak-hak bagi kelompok minoritas dan penduduk asli.<sup>9</sup> *Availability* (ketersediaan) bersumber dari adanya suatu prinsip bahwa terdapat korelasi yang erat antara rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinan, baik dalam konteks perorangan maupun masyarakat. Oleh karenanya pemerintah harus dapat menjamin tersedianya pendidikan wajib dan tanpa biaya yang bermutu bagi setiap anak. Di dalam konsiderans huruf b Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan:

---

<sup>8</sup> Katarina Tomasevski, Pendidikan Berbasis Hak Asasi-Penyederhanaan Persyaratan Hak Asasi Manusia Global, disunting dalam bahasa Indonesia oleh M. Hamka (Bangkok: Biro Pendidikan Wilayah Asia Pasifik. UNESCO, 2006) h. 7-8.

<sup>9</sup> Ibid.

Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Diberikan kebebasan bagi orang tua untuk dapat memilih pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Hal ini juga sesuai dengan pasal 26 ayat (3) (Universal Declaration of Human Rights bahwa orang tua memiliki hak untuk memilih dan menentukan pendidikan bagi anak-anaknya: "Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children." Dalam hal ini pemerintah wajib untuk menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak (pasal 48 Undang-undang Perlindungan Anak).

*Accessibility* (keterjangkauan) berarti pemerintah harus menghapuskan praktik-praktik diskriminasi jender dan rasial dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia secara merata, dan pemerintah tidak sekedar puas dengan hanya pelarangan diskriminasi secara formal. Keterjangkauan itu berkenaan dengan jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi; pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan wajib dan tanpa biaya bagi seluruh anak usia sekolah. Hak atas pendidikan seyogianya diwujudkan secara progresif agar pendidikan wajib dan tanpa biaya dapat dilaksanakan sesegera mungkin, dan mempermudah akses untuk melanjutkan pendidikan setelah wajib belajar.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid., h. 7.



Kerangka kerja Aksi Dakar menekankan pada penghapusan segala bentuk diskriminasi, dan memprioritaskan anak-anak dengan kondisi keeksklusifitasan, lemah, marginal dan atau berkelainan. Beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan pelarangan diskriminasi seperti diatur dalam perjanjian internasional, sehingga kelompok tertentu seperti anak dengan tingkat kesulitan belajar tertentu dan suku minoritas, memperoleh perhatian yang lain. Hal ini secara eksplisit telah diatur dalam pasal 54 Undang-undang HAM yang menentukan: "Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara."

*Acceptability* (keberterimaan) mempersyaratkan penjaminan minimal mengenai mutu pendidikan, misalnya persyaratan kesehatan dan keselamatan atau profesionalisme bagi guru. Penjaminan tersebut harus ditetapkan, dimonitor dan dipertegas oleh pemerintah melalui sistem pendidikan, baik pada institusi pemerintah maupun swasta. Keberterimaan dapat diperluas melalui pemberdayaan peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia; penduduk asli dan minoritas berhak memprioritaskan penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar. Sementara itu, pelarangan terhadap hukuman fisik harus dilakukan dengan mengubah metode-metode pembelajaran dan penerapan disiplin sekolah. Persepsi yang muncul tentang anak-anak sebagai subyek yang berhak atas pendidikan dan berhak dalam pendidikan telah diperluas batasannya dalam hal keberterimaannya yang mencakup isi kurikulum dan buku pelajaran, yang sekarang ini lebih dipertimbangkan dalam

perspektif hak asasi manusia.<sup>11</sup> Standar pendidikan yang dapat diterima sangat penting untuk mencapai pemerataan akses dan penghapusan diskriminasi di sekolah-sekolah, disamping juga untuk menciptakan lingkungan tempat setiap anak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya secara utuh. Pemerintah harus menjamin bahwa kurikulum, metoda pembelajaran termasuk metode evaluasi yang diterapkan adalah sejalan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik.

Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan (Konsiderans huruf c Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional). Demikian pula dalam pasal 4 ayat (6) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang menentukan: "Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan."

*Adaptability* (kebersesuaian) mempersyaratkan sekolah untuk tanggap terhadap kebutuhan setiap anak, agar tetap sesuai dengan KHA. Hal ini mengubah pendekatan tradisional, yakni sekolah yang mengharapakan bahwa anak-anaklah yang harus dapat menyesuaikan terhadap berbagai bentuk pendidikan yang diberikan kepada mereka. Karena HAM tidak berdiri sendiri, kesesuaian menjamin diterapkannya hak asasi manusia dalam pendidikan dan memberdayakan HAM tersebut

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

melalui pendidikan.<sup>12</sup> Hal ini sejalan dengan adanya pandangan bahwa anak ditempatkan sebagai subyek dan bukan sebagai obyek. Bilamana pendidikan hanya menempatkan anak sebagai obyek semata maka hal ini menunjukkan tidak adanya perlindungan bagi anak sehingga melanggar ketentuan pasal 52 Undang-undang HAM yang menentukan:

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Perspektif HAM akan mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan peran vital pendidikan yang mentransformasi nilai-nilai inti dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan untuk menghapuskan tidak hanya kemiskinan, tetapi juga rasialisme, ketidaktoleran terhadap agama tertentu dan alasan-alasan lain yang menyebabkan ketidakharmonisan sosial. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (pasal 3 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional).

Dari sisi pendekatan pendidikan yang berbasis hak asasi manusia menurut kerangka dari UNICEF antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 8.



- Mengakui hak-hak setiap anak.
- Memandang anak secara keseluruhan dalam sebuah konteks yang luas.
- Terpusat pada anak
- Sensitif pada jender dan ramah pada anak perempuan.
- Memajukan hasil pembelajaran yang berkualitas.
- Memberikan pendidikan berdasarkan realitas kehidupan anak-anak.
- Bertindak untuk menjamin terjadinya inklusi, rasa hormat, dan kesetaraan kesempatan bagi semua anak.
- Memajukan hak-hak dan tanggung jawab siswa dalam lingkungan sekolah
- Meningkatkan kemampuan, moral, komitmen dan status pengajar
- Berpusat pada keluarga.<sup>13</sup>

Dalam hukum positif di Indonesia, sesungguhnya pendidikan anak yang berbasis pada hak asasi manusia telah diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang menentukan: "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa." Selain itu pendidikan yang diarahkan pada pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi juga ditentukan dalam pasal 50 Undang-undang Perlindungan Anak.

---

<sup>13</sup> Felisa Tibbitts, "Pendekatan Berbasis Hak Asasi Atas Pendidikan," EENET Asia Newsletters, Juni 2007, h. 1.

Penyelenggaraan pendidikan anak yang termasuk dalam kerangka perlindungan anak harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak anak sesuai yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut: a) nondiskriminasi, b) kepentingan yang terbaik bagi anak, c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan d) penghargaan terhadap pendapat anak.

*Prinsip non diskriminasi* menggambarkan bahwa penyelenggaraan pendidikan anak harus bebas dari segala bentuk ketidakadilan, dan memprioritaskan anak-anak dengan kondisi lemah, marjinal dan atau berkebutuhan khusus. Dalam hal ini pemerintah harus menyediakan pendidikan wajib yang dapat terjangkau oleh semua kalangan dan tanpa biaya bagi masyarakat yang tidak mampu. Dalam pasal 5 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional telah diatur dengan jelas:

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

Kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi juga diatur secara eksplisit dalam pasal 11 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Penyelenggaraan pendidikan wajib tanpa biaya telah diamanatkan dalam pasal 34 ayat (2) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang menentukan: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya."

*Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak* adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut pendidikan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan maupun yudisiil, harus berprioritas pada kepentingan yang terbaik bagi anak. Di dalam asas ke-7 Deklarasi Hak-hak Anak menjelaskan: "Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat Sekolah Dasar." Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan pada umumnya dan yang memungkinkannya, atas dasar kesempatan yang sama untuk menyumbangkan kemampuannya, pendapat pribadinya dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan dasar oleh mereka yang bertanggung jawab tersebut yang terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan



pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hal ini.<sup>14</sup>

*Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan* adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Oleh karenanya selain pemerintah, orang tua juga memiliki peran untuk memilih satuan pendidikan bagi anak-anaknya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional: "Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya." Tidak hanya orang tua, masyarakat juga berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan dalam upaya memberikan hak asasi anak untuk berkembang. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah (Penjelasan Umum Undang-undang Perlindungan Anak). Pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Bahkan pemerintah juga menyediakan pendidikan khusus sebagai pendidikan bagi anak-anak yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial,

---

<sup>14</sup> Made Sadhi Astuti, op.cit., h. 16.

dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (pasal 32 ayat (1) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional). Di samping itu, juga disediakan Pendidikan layanan khusus sebagai pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi (pasal 32 ayat (2) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional). Bahkan masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

*Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak* adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Pasal 10 Undang-undang Perlindungan Anak menentukan bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Jelasnya, dalam dunia pendidikan, anak-anak harus dipandang sebagai subyek dan bukan sebagai obyek. Anak harus memperoleh kebebasan untuk dapat mengemukakan pendapatnya dalam dunia pendidikan. Pendidikan harus dapat mengakomodasi keinginan serta bakat dan minat anak.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional mengatur tentang standar nasional pendidikan yang terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar nasional pendidikan tersebut harus diarahkan



dan berorientasi pada hak asasi manusia. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Standar nasional pendidikan juga harus berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional berbasis pada hak asasi manusia. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan kepentingan anak.

Pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik (Pasal 45 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional). Dibutuhkan peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

Proses pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam kelas sehingga proses evaluasi dilakukan bersumber dari keberhasilan dalam kelas melainkan dengan *community based approach*. Pemahaman budi pekerti dan moral yang teraplikasikan secara praktek dalam proses interaksi antar komunitas sekolah justru menjadi evaluasi yang penting untuk diterapkan mengarah pada pemahaman pendidikan anak adalah sebuah hak anak. Sehingga dimensi yang perlu mengedepan adalah adanya komitmen bersama untuk menciptakan pendidikan anak berbasis hak asasi manusia. Menurut Felisa Tibbitts: "Hak asasi di sekolah-sekolah bukan



saja tentang pendidikan dalam ruangan kelas, tapi cara hidup di sekolah-sekolah yang bersangkutan."<sup>15</sup>

Penyelenggaraan pendidikan anak berbasis hak asasi manusia yang mengandung substansi hukum (*legal substance*) dan struktur hukum (*legal structure*) yang baik juga harus dibarengi oleh budaya hukum (*legal culture*) yang baik pula. Pemerintah, masyarakat maupun institusi pendidikan harus menunjukkan faktor kepemimpinan yang *committed* terhadap supremasi hukum, juga etik kepemimpinan yang mencakup standar-standar sebagai berikut: *responsibility and accountability; commitment; responsiveness; knowledge and skills; conflicts of interest*; dan *professional ethics*.<sup>16</sup>

Seluruh proses pengembangan pendidikan anak berbasis hak asasi manusia diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun social,<sup>17</sup> sehingga pada akhirnya akan mewujudkan generasi yang berkualitas, tangguh, memiliki nasionalisme tinggi, serta berakhlak mulia.

### C. Penutup

Pelaksanaan pendidikan anak berbasis HAM yang telah diatur melalui instrumen hukum internasional antara lain *Universal Declaration of Human Rights*, *Convention in the Rights of the Child* (1989), Konvensi UNESCO tentang Menentang

<sup>15</sup> Felisa Tibbitts, op.cit., h. 3

<sup>16</sup> Muladi, op.cit., h. 27

<sup>17</sup> Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), h. 79.

Diskriminasi Pendidikan (1960), Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (1965), Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966), Deklarasi Dunia tentang Pendidikan Untuk Semua (*Education for All Declaration*), Forum Pendidikan Dunia di Dakar, dan Komite Hak Anak harus diimplementasikan dalam berbagai instrumen nasional. Oleh karenanya beberapa instrumen hukum nasional yang mengatur tentang pendidikan tampak dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Kesejahteraan Anak, Undang-undang HAM, Undang-undang Dasar Perlindungan Anak, serta Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan akan bertujuan untuk membantu anak dalam meningkatkan kemampuan intelektualitas maupun pembentukan karakter yang baik. Pendidikan akan sangat penting fungsinya untuk membentuk manusia secara utuh (holistik) dengan mengembangkan aspek fisik, emosi, sosial, kreativitas, spiritual dan intelektual anak secara optimal.

Pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi pemerintah untuk melaksanakannya sesuai dengan berbagai kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Kewajiban hukum dari pemerintah terhadap pendidikan anak yang berbasis hak asasi manusia mengacu pada 4A, yaitu *availability* (ketersediaan), *accessibility* (keterjangkauan), *acceptability* (keberterimaan), dan *adaptability* (kebersesuaian).

Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta

relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Pendidikan anak yang berbasis pada hak asasi manusia telah diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang menentukan bahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Selain itu pendidikan yang diarahkan pada pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi juga ditentukan dalam pasal 50 Undang-undang Perlindungan Anak.

Penyelenggaraan pendidikan anak yang termasuk dalam kerangka perlindungan anak harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar KHA sesuai yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu: a) non diskriminasi; b) kepentingan yang terbaik bagi anak, c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan d) penghargaan terhadap pendapat anak.

Penyelenggaraan pendidikan anak harus bebas dari segala bentuk ketidakadilan dan diskriminasi, serta memprioritaskan anak-anak dengan kondisi lemah, marginal dan atau berkebutuhan khusus. pemerintah harus menyediakan menerapkan pendidikan wajib yang dapat terjangkau oleh semua kalangan dan tanpa biaya bagi masyarakat yang tidak mampu. Ada kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi.

Di dalam semua tindakan yang menyangkut pendidikan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan



legislatif, dan yudisiil, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Pendidikan yang terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal harus dapat saling melengkapi dan memperkaya. Bahkan pemerintah juga menyediakan pendidikan khusus sebagai pendidikan bagi anak-anak yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Di samping itu, juga disediakan pendidikan layanan khusus sebagai pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Di dalam dunia pendidikan, anak-anak harus dipandang sebagai subyek dan bukan sebagai obyek. Anak harus memperoleh kebebasan untuk dapat mengemukakan pendapatnya dalam dunia pendidikan. Pendidikan harus dapat mengakomodasi keinginan serta bakat dan minat anak.

Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan dimana kesemuanya harus berorientasi pada hak asasi manusia demi kepentingan terbaik bagi anak. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada pendekatan hak asasi manusia sehingga sesuai dengan standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional berbasis pada hak asasi manusia.

Proses pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam kelas sehingga proses evaluasi dilakukan bersumber dari keberhasilan dalam kelas melainkan dengan *community based approach*. Pemahaman budi pekerti dan moral yang teraplikasikan secara praktek dalam proses interaksi antarkomunitas sekolah justru menjadi evaluasi yang penting

untuk diterapkan mengarah pada pemahaman pendidikan anak adalah sebuah hak anak, sehingga dimensi yang perlu mengedepan adalah adanya komitmen bersama untuk menciptakan pendidikan anak berbasis hak asasi manusia.

Pendidikan anak berbasis hak asasi manusia akan mewujudkan kesejahteraan anak sehingga pada akhirnya akan mewujudkan generasi yang berkualitas, tangguh, memiliki nasionalisme tinggi, berakhlak mulia serta mampu menciptakan harmonisasi dalam heterogenitas. Oleh karenanya perlu komitmen bersama dari seluruh komponen masyarakat bagi terselenggaranya pendidikan anak berbasis hak asasi manusia.

*The best education for the best generation.*

## Daftar Pustaka

- Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: Restu Agung, 2007).
- Adzkar Ahsinin, *Aturan Yang Berpihak Pada Anak* (Jakarta: Yayasan Pemantau Hak Anak, 2008).
- Beetham, David, *Democracy and Human Rights* (London: Blackwell, 1999).
- Convention on the Rights of the Child
- Dias, Clarence J. dan Gilles, David, *Human Rights, Democracy and Development*, (Montreal: ICHRDD, 1993).
- Felisa Tibbitts, "Pendekatan Berbasis Hak Asasi Atas Pendidikan", *EENET Asia Newsletters*, Juni 2007.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985).
- Made Sadhi Astuti, "Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak" (Malang: Universitas Negeri Malang, 2003).
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: The Habibie Center, 2002).
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).
- Tomasevski, Katarina, *Pendidikan Berbasis Hak Asasi - Penyederhanaan Persyaratan Hak Asasi Manusia Global*, disunting oleh M. Hamka (Bangkok: Biro Pendidikan Wilayah Asia Pasifik UNESCO, 2006).
- United Nations, *Human Rights A Compilation of International Instruments*, Volume I (New York, 1983).
- Universal Declaration of Human Rights



Undang Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional